

## DAFTAR BACAAN

### **Buku**

- Bakhtiar, *Pedoman Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Direktorat Bina Penegakan Hukum Jakarta, 2012.
- Budiarta, I Nyoman Putu, *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pradnya Paramita, Cet 2, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Ramli, Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Samaloisa, Rinto W., *Outsourcing Kontradiksi Antara Konsep Hukum dan Praktik*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014.

### **Skripsi**

Franiswara, Kurnia Putri, *Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menetapkan Status PKWT Menjadi PKWTT Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

Maghfiroh, Rizka Amaliyah, *Praktek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT.Cahaya Indah Madya Pratama (Kajian Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*, **Skripsi**, 2016.

Rahmania, Ghina, *Kepastian Hukum Terhadap Bentuk Perjanjian Kerja Outsourcing di BUMN Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2018.

### **Tesis**

Ariandi, Ahmad Fathir Dean, *Praktik Outsourcing Dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan (Studi Beberapa Perusahaan di Balikpapan)*, **Tesis**, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Panggabean, H.P., *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jala Permata, Jakarta, 2007.

Rosmanasari, Evi, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. INKANINDO) di PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan*, **Tesis**, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

### **Jurnal**

Amalia, Apri, 'Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian', *USU Law Journal*, Vol 5, No 1, 2017.

Andina, Elga, 'Ketidakpuasan Buruh Alih Daya', *Info Singkat P3DI*, Vol 5, No 9, Mei 2013.

Charda S, Ujang, 'Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004', *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 1, No 1, 2017.

Julianti, Lis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia', *Jurnal Advokasi*, Vol 5, No 1, 2015.

Kalangi, Roosje, 'Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kinerja Aparat Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal LPPM EkoSosBudKum*, Vol 2, No 1, 2015.

Lanny, Ramli, 'The Settlement of The Industrial Relation Dispute In Indonesia', *Studia Humanitatis*, No 2, 2019.

Probowati, Dwiya Endah Pandu, 'Praktek *Outsourcing* di BUMN Perspektif Ekonomi Syariah', *Ejournal INSKLUSIF*, Edisi 1, Vol 1, 2016.

Ratnaningsih, Erna, 'Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi', *Pakuan Law Review*, Vol 4, No 1, 2018.

Rianto, Teguh, 'Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan', *Pakuan Law Review*, Vol 1, No 2, 2015.

Saefuloh, Asep Ahmad, 'Kebijakan *Outsourcing* di Indonesia: Perkembangan dan Permasalahan', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 2, No 1, Juni 2011.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya, Surabaya, 18 Oktober 2019.

### **Internet**

BPHN, "Kedudukan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), h. 1, dikunjungi pada tanggal 24 September 2019.

BUMN, "Direksi BUMN Diminta Jalankan Rekomendasi Panja *Outsourcing* DPR", [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id), 30 Oktober 2013, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2019.

Faqih, Mansyur, "Tiga Masalah *Outsourcing* BUMN Menurut Dahlan Iskan", [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 10 April 2013, dikunjungi pada tanggal 25 September 2019.

ILO, "Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana", [www.ilo.org](http://www.ilo.org), h. 9, dikunjungi pada tanggal 9 Oktober 2019.

KPU, "Visi Misi Program Aksi Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla PEMILU Presiden dan Wakil Presiden 2014", [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), dikunjungi pada tanggal 13 September 2019.

Soebroto, Arif Christiono, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas",

[www.birohukum.bappenas.go.id](http://www.birohukum.bappenas.go.id), h. 3, dikunjungi pada tanggal 24 September 2019.

Taufiq, Muhammad, “Revitalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), Jakarta, September 2011, h. 3, dikunjungi pada tanggal 24 September 2019.

Thea DA, Ady, “Persoalan Outsourcing di BUMN Belum Tuntas”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 8 Februari 2018, dikunjungi pada tanggal 27 Juni 2019.